



LAPORAN KINERJA (LKj)



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAP**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025 telah selesai disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak selama tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi kami untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Siak 2021-2026.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2025.

Akhir kata, kepada seluruh Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025 ini saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Siak Sri Indrapura, Februari 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK**



drh. Hj SUSILAWATI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710902 199703 200 4

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAMPIRAN	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Bidang Kewenangan.....	1
1.3 Sumber Daya Aparatur.....	9
1.4 Rencana Strategis DPMK.....	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Komponen Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja 2025.....	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja DPMK.....	21
3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	14
3.1.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan	
Tahun Sebelumnya	38
3.1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	
dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	41
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Solusi	
Yang Telah Dilakukan.....	42
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
3.1.6 Capaian Program dan Kegiatan.....	45
3.2 Realisasi anggaran.....	47
3.2.1 Ikhtisar Realisasi Belanja.....	47
 BAB IV PENUTUP.....	50

LAMPIRAN	Hal
1.2 Struktur Organisasi DPMK.....	8
1.3.1.1 Tabel Jumlah Pegawai PNS, PPPK dan Non ASN di DPMK.....	9
1.3.1.2 Tabel Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Pendidikan	10
1.3.1.3 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	10
1.3.2 Peta Jabatan DPMK	12
2.2 Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	16
2.3. Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	17
2.1.1 Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	21
3.1.2 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian DPMK Tahun 2022-2025	38
3.1.3 Tabel Pengukuran Kinerja berdasarkan RENSTRA	41
3.2.1 Tabel Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025.....	48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, kami bermaksud akan mengadakan pembinaan/asistensi kepada aparatur PD dalam teknis penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Pelaporan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategi atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai.

1.2 Bidang Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, kami bermaksud akan mengadakan pembinaan/asistensi kepada aparatur PD dalam teknis penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Pelaporan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategi atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai.

1.2 Bidang Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. Pelaksanaan Urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas membawahi Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang, yaitu;
 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung;
 2. Bidang Pemerintahan Kampung; dan
 3. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung.
- b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 1. Subbag Perencanaan Program dan Umum; dan
 2. Subbag Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang

Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung;
3. Merumuskan bahan kebijakan penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
4. Menyelenggarakan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan adat kampung, pelatihan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan;
5. Menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat kampung dalam menyuarkan aspirasi masyarakat;
6. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
7. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
8. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan nilai budaya, agama, dan keagamaan di masyarakat dan pelestarian adat, budaya dan sosial;
9. Menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi Lembaga Masyarakat Kampung dan Adat Kampung;

10. Merumuskan bahan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung;
 11. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemberdayaan ekonomi, kerjasama kampung, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 12. Menyelenggara fasilitasi peningkatan produksi, mutu, potensi, pemasaran lembaga ekonomi kampung;
 13. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung/Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 14. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi kampung;
 15. Melaksanakan pemberdayaan kerjasama ekonomi antar kampung;
 16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemerintahan Kampung. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemerintahan Kampung;
 2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di Bidang Pemerintahan Kampung;
 3. Menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kampung;

4. Menyelenggarakan penyusunan data base/profil kampung dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kampung;
5. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kampung;
6. Menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas Kampung dan Kelurahan;
7. Melaksanakan evaluasi perkembangan kampung dan lomba kampung;
8. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas Penghulu, Perangkat Kampung dan anggota Badan Usaha Permasyarakatan Kampung;
9. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
10. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kampung;
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
12. Menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi atas pendataan Indeks Kampung Mambangun;
13. Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kampung;
14. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Lembaga Pemerintahan Kampung;
15. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Kampung; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung. Untuk melaksanakan tugas Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan dan aset kampung;
 4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi terhadap dalam rangka penertiban administrasi keuangan dan aset kampung;
 5. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa aset Kampung;
 6. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Keuangan dan Aset Kampung;
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
 8. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset kampung dengan instansi atau pihak terkait;
 9. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Kampung; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
5. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan sub koordinator Pelaksana Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
6. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

1.2. Struktur Organisasi DPMK Kab. Siak

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 122 Tahun 2023
Tanggal : 16 Desember 2023

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,
ALFEDRI

1.3. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai berikut :

1.3.1 Susunan Kepegawaian

Adapun kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak sebagai berikut :

Tabel 1.3.1.1
Jumlah Pegawai PNS, PPPK dan Non ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

NO	STAF ASN DAN NON ASN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	2
4	Jabatan Fungsional PSM	3
5	Pelaksana	28
6	Non ASN	1
JUMLAH		38

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2025

Jumlah pegawai PNS, PPPK, Non ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025 sebanyak 48 orang terdiri dari :

- 1. PNS : 19 Orang
- 2. PPPK : 18 Orang
- 2. Non ASN : 1 Orang

Dari PNS terdiri dari Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana

1. Struktural : 6 Orang
2. Fungsional : 3 Orang
3. Pelaksana : 28 Orang
4. Non ASN : 1 Orang

Tabel 1.3.1.2
Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	7
3	Strata 1 (S-1)	20
4	Diploma 3	2
5	SLTA/SMK/MA	9
JUMLAH		38

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2025

Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, yang secara total berjumlah 38 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana berjumlah 27 orang atau sekitar 71,05% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah baik, meski tetap akan terus ditingkatkan.

Tabel. 1.3.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	12
3	Golongan II	2
JUMLAH		17

Data :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2025

Sedangkan bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.1.3. pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 12 orang (70,59%).

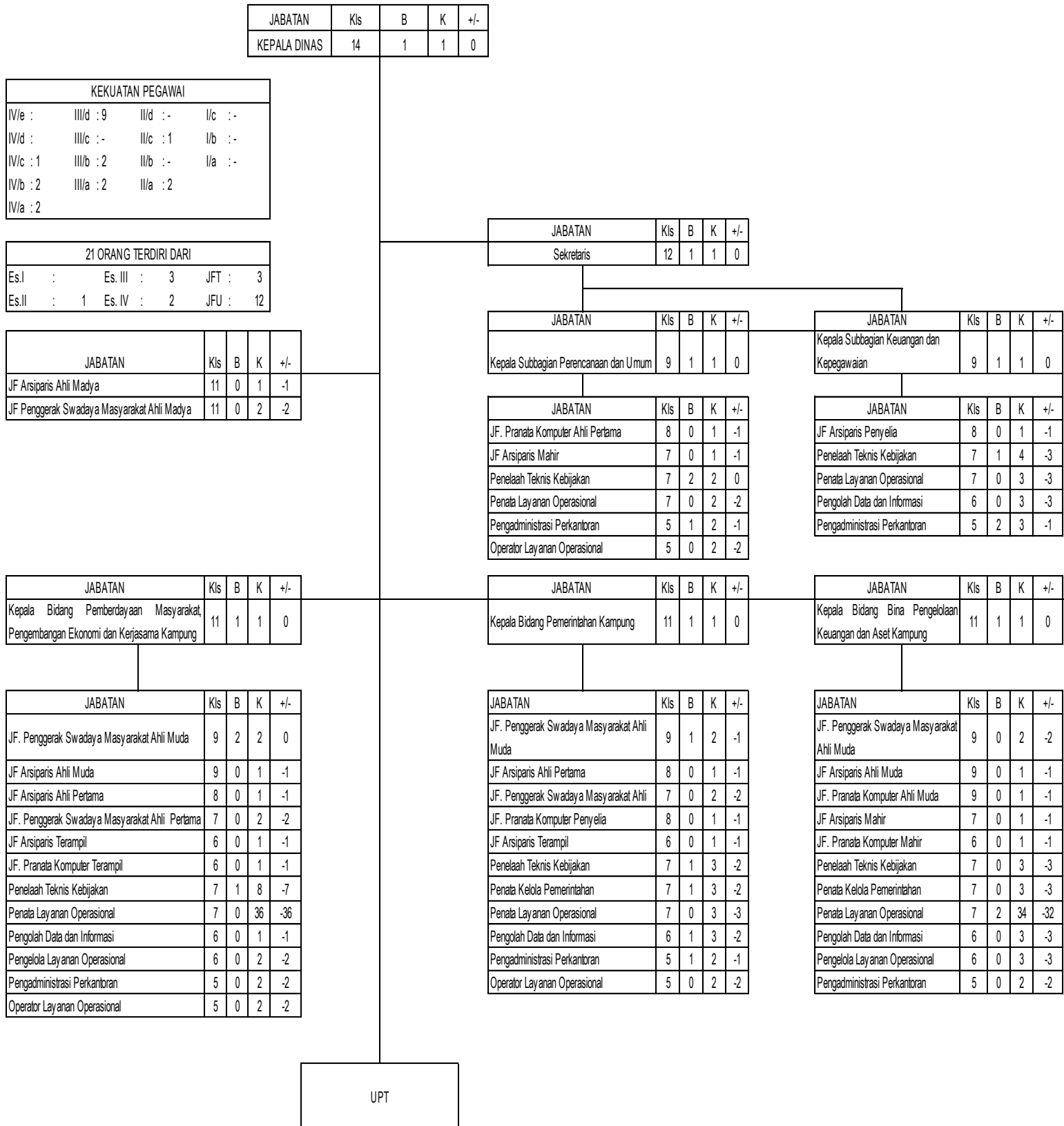
1.3.2 Analisis Kepegawaian

Sesuai Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak. Dapat disampaikan dari Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025 dapat kita ketahui bahwa kebutuhan ASN sebanyak 170 orang terdiri dari 6 orang Jabatan Struktural, 3 orang Jabatan Fungsional, 10 orang Jabatan Pelaksana, 3 orang Jabatan Pelaksana PPPK dan 85 orang Jabatan Pelaksana PPPK Paruh Waktu dan masih ada 63 orang Jabatan ASN yang dibutuhkan belum terisi yaitu: 1 orang Jabatan Struktural, 24 orang Jabatan Fungsional dan 38 orang Jabatan Pelaksana.

Kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak sebagai berikut :

1.3.2. Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak

PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN 2025



1.4 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Adapun permasalahan yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung antara lain;

1. Belum optimalnya pemahaman tugas dan fungsi dari lembaga kemasyarakatan kampung
2. Keberdayaan masyarakat masih rendah
3. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kampung

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung periode 2021-2026, arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada Tahun 2025 sebagai berikut :

- ❖ Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- ❖ Penyelenggaraan pelayanan umum dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- ❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- ❖ Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- ❖ Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dibidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

II. PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak disusun berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

2.1 Komponen Strategis

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Adalah **“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Budaya Melayu”**. Guna mendukung tercapainya tujuan maka ditetapkan sasaran yang akan diraih antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung;
Indikator : Persentase Kampung Mandiri
2. Meningkatkan lembaga kemasyarakatan dan adat kampung
Indikator : Persentase kelembagaan masyarakat perkampungan yang aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada dokumen RPJMD, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Siak menetapkan tujuan dan sasaran serta target kinerja sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kampung Mandiri}}{\text{Jumlah Kampung}} \times 100\%$
2	Meningkatkan lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100\%$

Sumber Data : IKU Dinas Masyarakat dan Kampung Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 35 tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Lembaga Ekonomi Kampung	Peningkatan Persentase Kampung Mandiri	49,18%
2.	Meningkatnya Peran Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Kampung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Kampung yang Aktif	95,56%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.388.178.287,00	APBD-P
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	174.999.750,00	APBD-P
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	1.876.642.800,00	APBD-P
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.738.076.557,00	APBD-P

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses perencanaan penetapan program dan kegiatan untuk satu tahun berdasarkan sasaran strategis beserta indikator kinerja. Rencana kinerja tahunan disusun dengan menyajikan sasaran, indikator kinerja dan target, kemudian program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, termasuk satuan dan target. Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja, diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagaimana terlampir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melaksanakan 4 (empat) program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Kerja Sama
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat

Tabel. 2.3.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran			Program	Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Nilai Prediket SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : - Dana Out put : - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Out come : - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Rupiah Orang/Bulan Persen	2.610.276.739,00 21,00 100,00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : - Dana Out put : - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Out come : - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Paket Persen	152.876.900,00 69,00 100,00	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Out come : - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Paket Persen	84.949.400,00 13,00 100,00	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Out come : - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Dokumen Persen	6.360.000,00 2,00 100,00	

No	Sasaran			Program	Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Out come : - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi	Rupiah Laporan Persen	163.045.000,00 200,00 100,00	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Pengadaan Mebel	Input : - Dana Out put : - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Out come : - Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Unit Tahun	216.760.000,00 55,00 1,00	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Out come : - Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Unit Tahun	255.020.000,00 33,00 1,00	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Out come : - Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Unit Tahun	28.393.800,00 2,00 1,00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Out come : - Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor	Rupiah Laporan Tahun	3.300.000,00 1,00 1,00	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Out come : - Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor	Rupiah Laporan Persen	108.800.000,00 1,00 1,00	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Out come : - Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor	Rupiah Laporan Persen	2.538.786.648,00 23,00 100,00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Out come : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPMK Kabupaten Siak	Rupiah Unit Persen	23.750.000,00 6,00 100,00	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Out come : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPMK Kabupaten Siak	Rupiah Unit Persen	153.700.000,00 6,00 100,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Out come : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPMK Kabupaten Siak	Rupiah Unit Persen	30.305.000,00 30,00 100,00	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Out come : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPMK Kabupaten Siak	Rupiah Unit Persen	11.854.800,00 1,00 100,00	

No	Sasaran			Program	Sub Kegiatan				Ket					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Lembaga Ekonomi Kampung	Peningkatan Persentase Kampung Mandiri	49,18 %	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah kampung yang melakukan kerja sama antar kampung								
					Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Out come : - Jumlah kampung yang melakukan kerja sama	Rupiah Dokumen Persen	174.999.750,00 1,00 73,77						
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi								
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang	Rupiah Dokumen Persen	1.323.540.000,00 43,00 98,36						
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Input : - Dana Out put : - Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang	Rupiah Orang Persen	213.610.000,00 267,00 98,36						
					Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Rupiah Dokumen Persen	173.292.800,00 2,00 98,36						
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Rupiah Dokumen Persen	166.200.000,00 1,00 98,36						
					3.	Meningkatnya Peran Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Kampung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Kampung yang Aktif	95,56%	Program Pemberdayaan n Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif			
										Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Dokumen Persen	1.406.464.000,00 43,00 87,70	
										Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Laporan Unit	61.100.000,00 1,00 87,70	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Dokumen Persen	270.512.557,00 1,00 87,70											
Jumlah				4 Program	23 Kegiatan			10.177.897.394,00						

2.4. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	0 s/d 50%	Sangat Rendah

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Adapun rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja yaitu:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan evaluasi kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak

3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel. 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	49,18 %	97,54%	198,33 (100)	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	95,56 %	100,00%	104,65 (100)	Sangat Tinggi

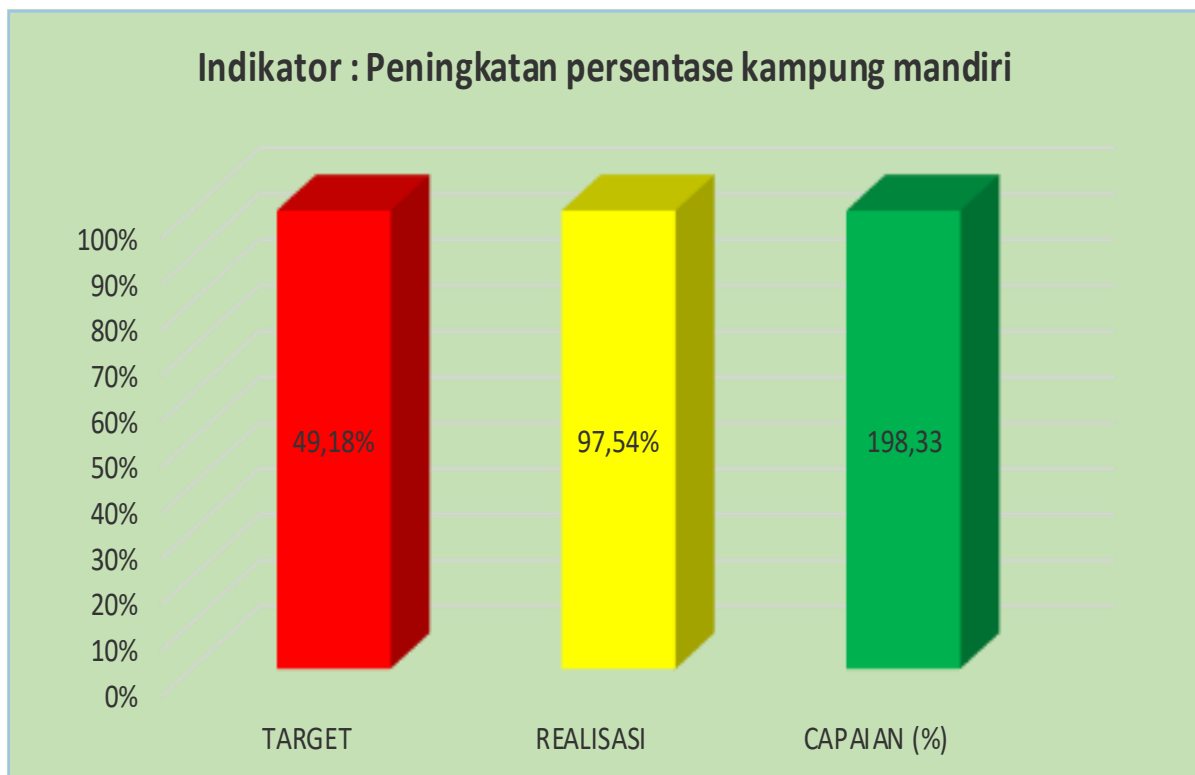
Sum

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja termasuk kategori capaian “**Sangat Tinggi**” artinya capaian kinerja $\geq 91\% \leq 100\%$.

Uraian dari analisis capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja peningkatan persentase kampung mandiri dengan capaian kinerja sasaran sebesar $91\% \leq 100\%$ termasuk kategori capaian “**Sangat Tinggi**”.

Grafik 3.5 Sasaran 1 dibandingkan dengan target tahun 2025



Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp 174.999.750
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp 1.323.540.000
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp 2.169.355.000
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 213.610.000
5. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Rp 173.292.800
6. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp 166.200.000

Dalam rangka untuk menilai Status Indeks Desa (ID) dibagi menjadi 5 (lima) status, yaitu: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri.

Indeks Desa (ID) adalah alat ukur untuk mengetahui kemajuan pembangunan desa. ID merupakan indeks komposit yang terdiri dari enam dimensi indeks, yaitu dimensi aksesibilitas, dimensi pelayanan dasar, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi lingkungan dan dimensi tatakelola pemerintahan kampung.

Penentuan Status Indeks Desa berdasarkan Klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

- Desa/Kampung Sangat Tertinggal : nilai $0\% \leq ID \leq 49,48\%$
- Desa/Kampung Tertinggal : nilai $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$
- Desa/Kampung Berkembang : nilai $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$
- Desa/Kampung Maju : nilai $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$
- Desa/Kampung Mandiri: nilai $79,63\% \leq ID \leq 100\%$

Indeks Desa digunakan pemerintah untuk mengukur status perkembangan desa dan menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Dengan ID, desa-desa dapat mengetahui posisi mereka dalam skala pembangunan dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.

Indeks Desa (ID) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan enam dimensi indeks desa, yaitu :



Tabel 3.1.2
Indek Desa (ID) Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Jl. Hang Tuah No. 13 Kelurahan Kampung Rempak
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
Kode Pos : 28673 E-mail : dpmk@mail.siakkab.go.id

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun 2025 bertempat di:

1. Kabupaten : Siak
2. Provinsi : Riau

Telah dilakukan Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kabupaten hasil dari pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan Tim Verifikasi dan validasi yang melibatkan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

disahkan Tim Verifikasi dan Validasi,

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Siak

(Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si)
NIP. 19690601 199002 1 002

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

(Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN, M.Si)
NIP. 19690816 199002 1 002

Koordinator Tenaga Ahli
Kabupaten Siak

(I KETUT BAMBANG SISWANTO)

**REKAP STATUS DESA KABUPATEN SIAK
PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	TOTAL	STATUS DESA 2025				
			MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
1	SIAK	6	6	0	0	0	0
2	SUNGAI APIT	14	13	1	0	0	0
3	MINAS	4	4	0	0	0	0
4	TUALANG	8	8	0	0	0	0
5	SUNGAI MANDAU	9	7	2	0	0	0
6	DAYUN	11	11	0	0	0	0
7	KERINCI KANAN	12	12	0	0	0	0
8	BUNGA RAYA	10	10	0	0	0	0
9	KOTO GASIB	11	11	0	0	0	0
10	KANDIS	8	8	0	0	0	0
11	LUBUK DALAM	7	7	0	0	0	0
12	SABAK AUH	8	8	0	0	0	0
13	MEMPURA	7	7	0	0	0	0
14	PUSAKO	7	7	0	0	0	0
TOTAL		122	119	3	0	0	0

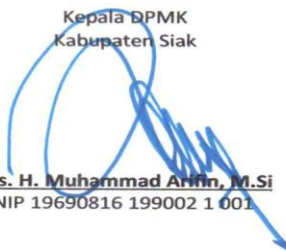
Disahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda
Kabupaten Siak



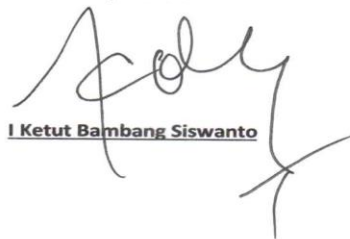
Drs. L. Budhi Yuwono, M.Si
NIP. 19690601 199002 1 002

Kepala DPMK
Kabupaten Siak



Drs. H. Muhammad Anfin, M.Si
NIP 19690816 199002 1 001

Koordinator Tenaga Ahli
Kabupaten Siak



I Ketut Bambang Siswanto

INDEKS DESA TAHUN 2025
KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS INDEK DESA 2025
1	140801	Siak	1408012003	Langkai	Mandiri
2	140801	Siak	1408012011	Tumang	Mandiri
3	140801	Siak	1408012012	Merempan Hulu	Mandiri
4	140801	Siak	1408012013	Rawang Air Putih	Mandiri
5	140801	Siak	1408012014	Suak Lanjut	Mandiri
6	140801	Siak	1408012015	Buantan Besar	Mandiri
7	140802	Sungai Apit	1408022002	Teluk Lanus	Maju
8	140802	Sungai Apit	1408022003	Tanjung Kuras	Mandiri
9	140802	Sungai Apit	1408022004	Parit I/II	Mandiri
10	140802	Sungai Apit	1408022005	Teluk Mesjid	Mandiri
11	140802	Sungai Apit	1408022008	Sungai Kayu Ara	Mandiri
12	140802	Sungai Apit	1408022009	Lalang	Mandiri
13	140802	Sungai Apit	1408022010	Mengkapan	Mandiri
14	140802	Sungai Apit	1408022011	Sungai Rawa	Mandiri
15	140802	Sungai Apit	1408022012	Penyengat	Mandiri
16	140802	Sungai Apit	1408022014	Teluk Batil	Mandiri
17	140802	Sungai Apit	1408022016	Bunsur	Mandiri
18	140802	Sungai Apit	1408022017	Harapan	Mandiri
19	140802	Sungai Apit	1408022019	Kayu Ara Permai	Mandiri
20	140802	Sungai Apit	1408022020	Rawa Mekar Jaya	Mandiri
21	140803	Minas	1408032002	Minas Timur	Mandiri
22	140803	Minas	1408032003	Minas Barat	Mandiri
23	140803	Minas	1408032004	Mandi Angin	Mandiri
24	140803	Minas	1408032005	Rantau Bertuah	Mandiri
25	140804	Tualang	1408042002	Tualang	Mandiri
26	140804	Tualang	1408042003	Pinang Sebatang	Mandiri
27	140804	Tualang	1408042004	Meredan	Mandiri
28	140804	Tualang	1408042005	Pinang Sebatang Timur	Mandiri
29	140804	Tualang	1408042006	Pinang Sebatang Barat	Mandiri
30	140804	Tualang	1408042007	Meredan Barat	Mandiri
31	140804	Tualang	1408042008	Perawang Barat	Mandiri
32	140804	Tualang	1408042009	Tualang Timur	Mandiri
33	140805	Sungai Mandau	1408052001	Muara Kelantan	Mandiri
34	140805	Sungai Mandau	1408052002	Teluk Lancang	Maju
35	140805	Sungai Mandau	1408052003	Sungai Selodang	Mandiri
36	140805	Sungai Mandau	1408052004	Olak	Mandiri
37	140805	Sungai Mandau	1408052005	Lubuk Jering	Mandiri
38	140805	Sungai Mandau	1408052006	Muara Bungkal	Mandiri
39	140805	Sungai Mandau	1408052007	Lubuk Umbut	Mandiri
40	140805	Sungai Mandau	1408052008	Bencah Umbai	Maju
41	140805	Sungai Mandau	1408052009	Tasik Betung	Mandiri
42	140806	Dayun	1408062001	Dayun	Mandiri
43	140806	Dayun	1408062002	Banjar Seminai	Mandiri
44	140806	Dayun	1408062003	Teluk Merbau	Mandiri
45	140806	Dayun	1408062004	Merangkai	Mandiri
46	140806	Dayun	1408062005	Lubuk Tilan	Mandiri
47	140806	Dayun	1408062006	Berumbung Baru	Mandiri
48	140806	Dayun	1408062007	Pangkalan Makmur	Mandiri
49	140806	Dayun	1408062008	Buana Makmur	Mandiri
50	140806	Dayun	1408062009	Suka Mulya	Mandiri
51	140806	Dayun	1408062010	Sawit Permai	Mandiri
52	140806	Dayun	1408062011	Sialang Sakti	Mandiri
53	140807	Kerinci Kanan	1408072001	Kerinci Kanan	Mandiri
54	140807	Kerinci Kanan	1408072002	Kerinci Kiri	Mandiri
55	140807	Kerinci Kanan	1408072003	Buana Bakti	Mandiri
56	140807	Kerinci Kanan	1408072004	Bukit Harapan	Mandiri
57	140807	Kerinci Kanan	1408072005	Kumbara Utama	Mandiri

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IINDEK DESA 2025
58	140807	Kerinci Kanan	1408072006	Bukit Agung	Mandiri
59	140807	Kerinci Kanan	1408072008	Simpang Perak Jaya	Mandiri
60	140807	Kerinci Kanan	1408072009	Buatan Baru	Mandiri
61	140807	Kerinci Kanan	1408072010	Gabung Makmur	Mandiri
62	140807	Kerinci Kanan	1408072011	Jati Mulya	Mandiri
63	140807	Kerinci Kanan	1408072012	Seminai	Mandiri
64	140807	Kerinci Kanan	1408072013	Delima Jaya	Mandiri
65	140808	Bunga Raya	1408082001	Bunga Raya	Mandiri
66	140808	Bunga Raya	1408082002	Jati Baru	Mandiri
67	140808	Bunga Raya	1408082003	Jayapura	Mandiri
68	140808	Bunga Raya	1408082011	Kemuning Muda	Mandiri
69	140808	Bunga Raya	1408082012	Buatan Lestari	Mandiri
70	140808	Bunga Raya	1408082013	Tuah Indrapura	Mandiri
71	140808	Bunga Raya	1408082014	Langsat Permai	Mandiri
72	140808	Bunga Raya	1408082015	Temusai	Mandiri
73	140808	Bunga Raya	1408082016	Dayang Suri	Mandiri
74	140808	Bunga Raya	1408082017	Suak Merambai	Mandiri
75	140809	Koto Gasib	1408092001	Pangkalan Pisang	Mandiri
76	140809	Koto Gasib	1408092002	Kuala Gasib	Mandiri
77	140809	Koto Gasib	1408092003	Teluk Rimba	Mandiri
78	140809	Koto Gasib	1408092004	Buatan I	Mandiri
79	140809	Koto Gasib	1408092005	Buatan II	Mandiri
80	140809	Koto Gasib	1408092006	Sengkemang	Mandiri
81	140809	Koto Gasib	1408092007	Rantau Panjang	Mandiri
82	140809	Koto Gasib	1408092008	Empang Pandan	Mandiri
83	140809	Koto Gasib	1408092009	KerANJI Guguh	Mandiri
84	140809	Koto Gasib	1408092010	Sri Gemilang	Mandiri
85	140809	Koto Gasib	1408092011	Tasik Seminai	Mandiri
86	140810	Kandis	1408102004	Belutu	Mandiri
87	140810	Kandis	1408102005	Kandis	Mandiri
88	140810	Kandis	1408102006	Sam-Sam	Mandiri
89	140810	Kandis	1408102007	Bekalar	Mandiri
90	140810	Kandis	1408102008	Jambai Makmur	Mandiri
91	140810	Kandis	1408102009	Sungai Gondang	Mandiri
92	140810	Kandis	1408102010	Pencing Bekulo	Mandiri
93	140810	Kandis	1408102011	Libo Jaya	Mandiri
94	140811	Lubuk Dalam	1408112001	Lubuk Dalam	Mandiri
95	140811	Lubuk Dalam	1408112002	Rawang Kao	Mandiri
96	140811	Lubuk Dalam	1408112003	Sri Gading	Mandiri
97	140811	Lubuk Dalam	1408112004	Sialang Baru	Mandiri
98	140811	Lubuk Dalam	1408112005	Sialang Palas	Mandiri
99	140811	Lubuk Dalam	1408112006	Empang Baru	Mandiri
100	140811	Lubuk Dalam	1408112007	Rawang Kao Barat	Mandiri
101	140812	Sabak Auh	1408122001	Bandar Sungai	Mandiri
102	140812	Sabak Auh	1408122002	Rempak	Mandiri
103	140812	Sabak Auh	1408122003	Belading	Mandiri
104	140812	Sabak Auh	1408122004	Sungai Tengah	Mandiri
105	140812	Sabak Auh	1408122005	Laksamana	Mandiri
106	140812	Sabak Auh	1408122006	Sabak Permai	Mandiri
107	140812	Sabak Auh	1408122007	Bandar Pedada	Mandiri
108	140812	Sabak Auh	1408122008	Selat Guntung	Mandiri
109	140813	Mempura	1408132001	Kota Ringin	Mandiri
110	140813	Mempura	1408132002	Paluh	Mandiri
111	140813	Mempura	1408132003	Benteng Hilir	Mandiri
112	140813	Mempura	1408132004	Benteng Hulu	Mandiri
113	140813	Mempura	1408132005	Kampung Tengah	Mandiri
114	140813	Mempura	1408132007	Merempan Hilir	Mandiri
115	140813	Mempura	1408132008	Telukmerempan	Mandiri
116	140814	Pusako	1408142001	Sungai Berbari	Mandiri
117	140814	Pusako	1408142002	Sungai Limau	Mandiri

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IINDEK DESA 2025
118	140814	Pusako	1408142003	Dosan	Mandiri
119	140814	Pusako	1408142004	Benayah	Mandiri
120	140814	Pusako	1408142005	Pebadaran	Mandiri
121	140814	Pusako	1408142006	Dusun Pusaka	Mandiri
122	140814	Pusako	1408142007	Perincit	Mandiri

Disahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda
Kabupaten Siak

Drs. L. Budhi Yuwono, M.Si
NIP. 19690601 199002 1 002

Kepala DPMK
Kabupaten Siak

Drs. H. Muhammad Arifin, M.Si
NIP 19690816 199002 1 001

Koordinator Tenaga Ahli
Kabupaten Siak

I Ketut Bambang Siswanto

Sasaran 2 : Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif dengan capaian kinerja sasaran sebesar **91% ≤ 100%** termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.

Grafik 3.5 Sasaran 1 dibandingkan dengan target tahun 2025



Pengukuran kinerja indikator persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif Tahun 2025 yaitu 100,00% (3836 lembaga yang aktif) dari target sebesar 95,56% (3666 lembaga yang aktif) dengan capaian kinerja indikator 104,65% (100%).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Rp 1.406.064.000
2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp

27.343.800

3. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp 61.100.000

4. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp 270.512.557

Lembaga kemasyarakatan kampung adalah lembaga sosial yang mengatur tata cara dan prosedur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga kemasyarakatan kampung berperan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif dihitung dengan membagi jumlah lembaga yang aktif dengan jumlah lembaga yang ada, kemudian dikalikan 100.

$$\frac{\text{Persentase lembaga yang aktif}}{\text{Total jumlah lembaga}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator **Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Kampung yang Aktif** bertujuan untuk mengukur sejauh mana wadah partisipasi masyarakat (seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat) berfungsi sebagai mitra pemerintah kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Kriteria lembaga aktif lembaga dianggap aktif jika memenuhi kriteria berikut:

Legalitas: Memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan pengurus dari Penghulu Kampung/Desa yang masih berlaku.

Kepengurusan: Memiliki struktur organisasi yang lengkap dan masih bertugas.

Operasional: Melaksanakan pertemuan rutin dan kegiatan/program kerja.

Administrasi: Menyusun laporan kegiatan atau memiliki buku administrasi lembaga.

Kemitraan: Terlibat aktif dalam Musrenbang Kampung atau kegiatan

pembangunan kampung

Data kelembagaan kampung/kelurahan yang aktif meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Karang Taruna dapat di lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Data Keaktifan Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan/ Kampung
Se Kabupaten Siak Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Jl. Hang Tuah No. 13 Kelurahan Kampung Rempak
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
Kode Pos : 28673 E-mail : dpmk@gmail.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 2 Desember 2025

Nomor : 400.10.3.1/DPMK/PM-UEK/834
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengiriman Data LKD/K Se- Kabupaten Siak

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor : B/350/400.10.3.1/DPMDDUKCAPIL/2025 tanggal 08 Oktober 2025 Perihal Permintaan Data LKD/K, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan data dimaksud terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK



Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN, M. Si
NIP.196908161990021002

Lampiran I

Nomor : 400.10.3.1/DPMK/PM-UEK/834

Tanggal : 2 Desember 2025

DATA JUMLAH LKK/K AKTIF DAN LAK/K KABUPATEN SIAK

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	RT			RK			LPM			PKK			Posyandu			Karang Taruna			LAD/K		
				Jmh RT	Jmh Aktif	Jmh Tidak Aktif	Jmh RK	Jmh Aktif	Jmh Tidak Aktif	Jmh LPM	Jmh Aktif	Jmh Tidak Aktif	Jmh PKK	Jmh Aktif	Jmh Tidak Aktif	Jmh Posyandu	Jmh Aktif	Jmh Tidak Aktif	Jmh Karang Taruna	Jmh Aktif	Jmh Tidak Aktif	Jmh LAD/K	Jmh Aktif	Jmh Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	<u>Siak</u>	122	9	2126	2126	0	683	683	0	124	124	0	131	131	0	608	608	0	121	121	0	43	43	0

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG KABUPATEN SIAK



Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN, M. Si
NIP.196908161990021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**DATA KEAKTIFAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN / KAMPUNG
SE-KABUPATEN SIAK TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Kampung	LKD/K DAN LAD/K																					
			RT			RK			LPM			PKK			POSYANDU			KARANG TARUNA			LAD/K			
			Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	20	20	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	1	12	12	0	1	1	0	0	0	0
		Rawang Kao	17	17	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
		Sri Gading	18	18	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		Sialang Baru	21	21	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0
		Sialang Palas	16	16	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		Empang Baru	15	15	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		Rawang Kao Barat	8	8	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
2	Sabak Auh	Rempak	15	15	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		Laksamana	11	11	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		Belading	8	8	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
		Bandar Sungai	12	12	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
		Sungai Tengah	17	17	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
		Sabak Permai	12	12	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		Bandar Pedada	8	8	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
3	Sungai Apit	Selat Guntung	11	11	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
		Kelurahan Sungai Apit	21	21	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		Parit I/II	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0
		Tanjung Kuras	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
		Teluk Batil	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
		Teluk Lanus	12	12	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
		Bunsur	8	8	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		Teluk Mesjid	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0
		Kayu Ara Permai	12	12	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
		Lalang	9	9	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
		Penyengat	14	14	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	0
		Mengkapen	15	15	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
		Sungai Kayu Ara	13	13	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
		Harapan	13	13	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
4	Dayun	Sungai Rawa	12	12	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
		Rawa Mekar Jaya	10	10	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		Dayun	24	24	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0
		Banjar Seminai	22	22	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0
		Pangkalan Makmur	16	16	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0
		Berumbung Baru	21	21	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	0
		Teluk Merbau	19	19	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0
		Merangkai	14	14	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Sawit Permai	28	28	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0
		Sialang Sakti	20	20	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0
		Lubuk Tilan	15	15	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0
		Buana Makmur	15	15	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
		Suka Mulya	14	14	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
5	Mempura	Koto Ringin	7	7	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0
		Paluh	8	8	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
		Benteng Hilir	11	11	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
		Benteng Hulu	14	14	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Kampung Tengah	3	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		Sungai Mempura	18	18	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
		Merempan Hilir	11	11	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0
		Teluk Merempan	6	6	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
6	Sungai Mandau	Muara Kelantan	10	10	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		Lubuk Jering	7	7	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		Olak	8	8	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		Teluk Lancang	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		Muara Bungkal	6	6	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		Sungai Selodang	15	15	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Bencah Umbai	5	5	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Lubuk Umbut	8	8	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		Tasik Betuk	5	5	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
7	Pusako	Sungai Berbari	4	4	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Sungai Limau	7	7	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Dosan	6	6	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
		Benayah	8	8	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
		Pebadaran	6	6	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
		Dusun Pusaka	9	9	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
		Perincit	6	6	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
8	Bunga Raya	Tuah Indrapura	18	18	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0
		Kemuning Muda	16	16	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		Jayapura	18	18	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Langsat Permai	15	15	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Dayang Suri	8	8	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
		Bungaraya	18	18	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0
		Jati Baru	28	28	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0
		Suak Merambai	4	4	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Buantan Lestari	14	14	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Temusai	14	14	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
9	Siak	Kel. Kampung Dalam	22	22	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
		Kel. Kampung Rempak	24	24	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
		Rawang Air Putih	7	7	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Merempan Hulu	10	10	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0
		Langkai	11	11	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0
		Buantan Besar	11	11	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0
		Tumang	15	15	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0
		Suak Lanjut	8	8	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	20	20	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0
		Kuala Gasib	14	14	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0
		Teluk Rimba	4	4	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Buatan I	11	11	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		Buatan II	19	19	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		Rantau Panjang	12	12	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		Sengkemang	8	8	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Empang Pandan	20	20	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Keranjil Guguh	18	18	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Tasik Seminal	11	11	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
11	Kerinci Kanan	Sri Gemilang	6	6	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Kerinci Kanan	18	18	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0
		Kerinci Kiri	18	18	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
		Delima Jaya	12	12	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
		Buana Bhakti	14	14	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Bukit Harapan	12	12	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0
		Kumbara Utama	12	12	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0
		Bukit Agung	14	14	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Simpang Perak Jaya	21	21	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Buatan Baru	15	15	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
12	Tualang	Gabung Makmur	12	12	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
		Jati Mulya	13	13	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Seminal	22	22	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0
		Perawang Barat	84	84	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0
		Tualang	68	68	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0
		Pinang Sebatang Barat	17	17	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0
		Pinang Sebatang Timur	24	24	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0
		Pinang Sebatang	19	19	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		Maredan	21	21	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0
		Maredan Barat	12	12	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
13	Minas	Tualang Timur	20	20	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0
		Kelurahan Perawang	91	91	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0
		Rantau Bertuah	12	12	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0
		Mandiingin	21	21	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	25	25	0	1	1	0	0	0	0
		Minas Timur	24	24	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	25	25	0	1	1	0	0	0	0
		Minas Barat	26	26	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0
		Kel. Minas Jaya	59	59	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0
		Kel. Telaga Sam-Sam	25	25	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
		Kel. Simpang Belutu	29	29	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
		Kel. Kandis Kota	44	44	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
14	Kandis	Kampung Belutu	36	36	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	7	7	0	1	1	0	0	0	
		Kampung Sam-Sam	38	38	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	40	40	0	1	1	0	0	0	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Libo Jaya	26	26	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0
		Sungai Gondang	11	11	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0
		Jambai Makmur	22	22	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		Bekalar	21	21	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0
		Kampung Kandis	27	27	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0
		Pencing Bekulo	12	12	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			2126	2126	0	683	683	0	124	124	0	131	131	0	608	608	0	121	121	0	43	43	0
Persentase			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%		
Total Persentase			100,00%																				

Siak Sri Indrapura, Januari 2026

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi
dan Kerjasama Kampung,



MUHAMMAD ARISTIANTO, SH
NIP. 19710418 200012 1002

3.1.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPMK Kabupaten Siak Tahun 2022 s.d. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	6	8	7	9	11	10	9	11	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	%	24.59	35.24	143.33 (100)	40.98	89.34	272.46 (100)	40.98	100.00	244.02 (100)	49,18 %	97,54%	198,33 (100)
2	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	%	82.32	89.82	109.11 (100)	91.15	89.82	103.56 (100)	91.15	89.82	98.54 (100)	95,56 %	100,00%	104,65 (100)

Sumber Data: 1. Renstra DPMK Kab. Siak tahun 2021 sd 2026

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Siak Tahun 2025

Berdasarkan data tabel di atas, pengukuran kinerja indikator peningkatan persentase kampung mandiri tahun 2022 sebesar 35,24% (24 kampung) dari target sebesar 24,59% (30 kampung) dengan capaian kinerja indikator 143,33% (100%), tahun 2023 sebesar 89,34% (109 kampung) dari target sebesar 32,79% (40 kampung) dengan capaian kinerja indikator 272,46% (100%), tahun 2024 sebesar 100,00% (122 kampung) dari target sebesar 40,98% (50 kampung) dengan capaian kinerja indikator 244,02% (100%), sedangkan tahun 2025 Ada penurunan 2,46% (3 Kampung) dari capaian kinerja tahun sebelumnya disebabkan ada beberapa perubahan indeks desa di tahun 2025 ini dari 3 dimensi penilaian menjadi 6 dimensi, namun capaian kinerja tahun 2025 termasuk kategori yang sangat baik yaitu sebesar 97,54% (119 kampung) dari target sebesar 49,18%

dengan capaian kinerja indikator 198,33% (100%).

Untuk pengukuran kinerja indikator persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif, tahun 2022 sebesar 89,82% dari target sebesar 82,32% dengan capaian kinerja indikator 109,11% (100%), tahun 2023 sebesar 89,82% dari target sebesar 86,73% dengan capaian kinerja indikator 103,56% (100%), tahun 2024 sebesar 89,82% dari target 91,15% dengan capaian kinerja 98,54%, sedangkan tahun 2025 ada kenaikan 10,18% dari capaian kinerja tahun sebelumnya karena keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan setiap kegiatan dengan aktif sehingga capaian kinerja tahun 2025 termasuk kategori yang sangat tinggi yaitu sebesar 100,00% dari target 95,56% dengan capaian kinerja 104,65.

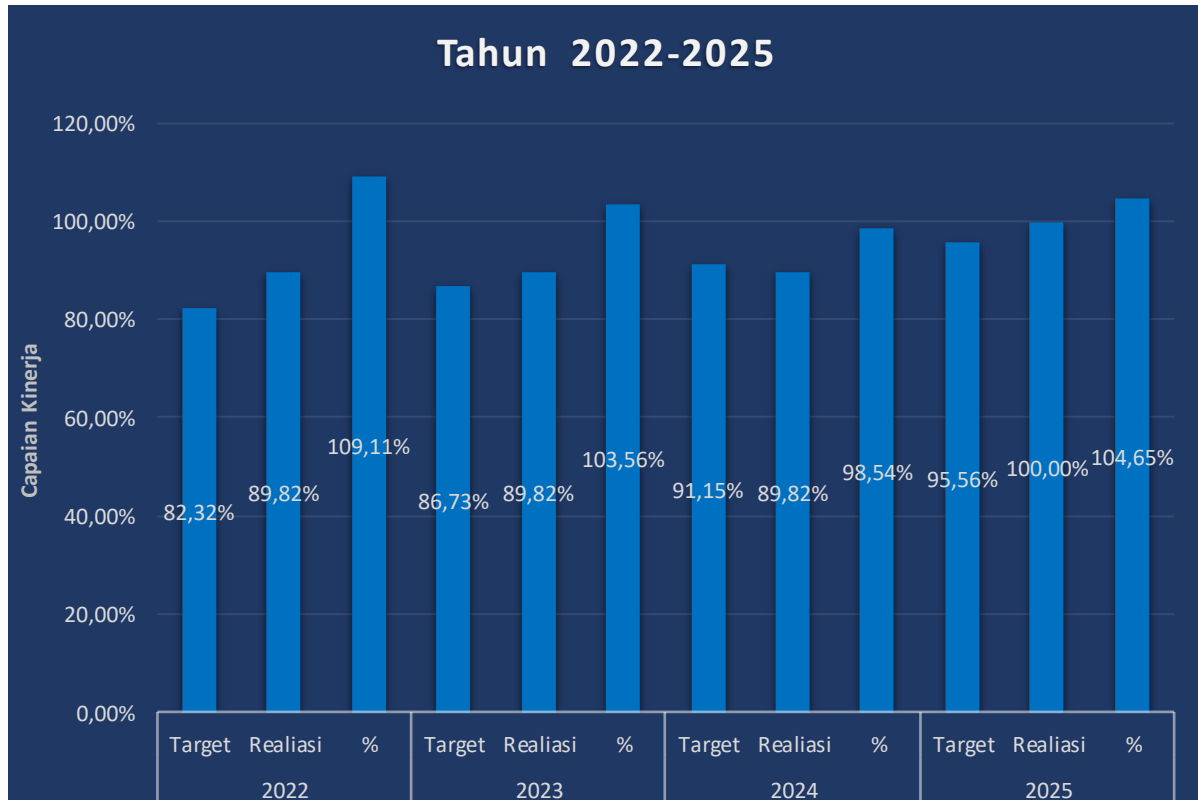
Perkembangan realisasi capaian kinerja DPMK Kabupaten Siak Tahun selama beberapa tahun terakhir seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1.2.1
Perbandingan indikator peningkatan persentase Kampung Mandiri
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak

Grafik 3.1.2.2
Perbandingan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat
kampung yang aktif beberapa tahun terakhir



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak

3.1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dengan Target Jangka Menengah

Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah membandingkan realisasi kinerja s.d tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis DPMK Tahun 2021 – 2026 pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPMK Kabupaten Siak
berdasarkan capaian tahun sebelumnya dengan target Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023			2024			2025			Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2026
			Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%	
1	4	5	6			7			8						10
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	24,59%	35,24 %	143,33	32,79 %	89,34%	272,46	40,98%	100,00%	244,02	49,18 %	97,54%	198,33 (100)	57,38%
2	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	82,32%	89,82 %	109,11	86,73 %	89,82%	103,56	91,15%	89,82	98,54	95,56 %	100,00%	104,65 (100)	100%

Sumber: Renstra DPMK Kab. Siak tahun 2021 sd 2026

Pada sasaran strategis DPMK terdapat 2 indikator kinerja dimana ke 2 indikator kinerja tersebut sudah melampaui target. Dengan demikian maka secara umum DPMK Kabupaten Siak telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMK Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1 Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain :

1. Mendorong Pemerintah Kampung melakukan penginputan pada Aplikasi Indeks Desa tahun 2025 pada link <https://id.kemendesa.go.id> dengan pengisian data 6 (enam) dimensi penilaian yakni Layanan Dasar, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Aksebilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
2. Memberikan pembinaan, evaluasi dan pengawasan kinerja kepada pemerintah kampung agar menggunakan Sistem Digitalisasi Smart Kampung pelayanan kepada masyarakat.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan kampung.
4. Penguatan kapasitas tenaga pendamping pengelolaan keuangan kampung dan Badan Usaha Milik Kampung.
5. Seluruh Kampung telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) online dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) secara baik dan tertib.
6. Seluruh Kampung telah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam pendataan aset kampung.
7. Penguatan kapasitas lembaga ekonomi kampung.
8. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan kemasyarakatan agar dapat memahami dan

menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat aktif dalam setiap program dan kegiatan di pemerintah kampung seperti dalam mmusyawarah di kampung.

9. Adanya pembinaan kinerja tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset kampung dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

3.1.4.2 Permasalahan atau hambatan:

1. Bertambahnya indikator penilaian dimensi dari tahun sebelumnya 3 dimensi indikator Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) menjadi 6 dimensi penilaian yakni Layanan Dasar, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Aksebilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
2. Kurangnya SDM yang memadai di tingkat kampung dalam menggunakan Sistem Digitalisasi Smart Kampung pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlunya penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan kampung.
4. Masih kurangnya minat masyarakat sebagai pengelola lembaga ekonomi kampung dan kurangnya sumber daya yang ada sebagai pengelola lembaga ekonomi kampung.
5. Belum semua kampung di dukung dengan jaraingan internet yang memadai untuk menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) online dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) secara maksimal.
6. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam pendataan aset kampung masih dalam kondisi offline disebabkan belum tersedianya akses online untuk server kabupaten .

3.1.4.3 Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat :

1. Melakukan pendampingan lebih intensif kepada pemerintah kampung agar dapat memenuhi indikator yang sudah ditetapkan melalui Indek Desa (ID).
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelolaan lembaga ekonomi kampung.
3. Perlunya tetap dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan kemasyarakatan agar dapat memahami dan mmenjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat aktif dalam setiap program dan kegiatan di pemerintah kampung.
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap keaktifan program dan kegiatan kelembagaan kampung dan kelurahan.

3.1.5 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, serta visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia;.
2. Sumber Daya Keuangan

Untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan di bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak,sekarang belum memiliki gedung kantor yang kondusif. Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan kemampuan

sumberdaya aparatur juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatanyang telah ditetapkan.Oleh karenanya, aparatur hendaknya mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilaku yang baik. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak secara kualitatif sudah baik.

Eselonisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak terdiri dari: 1 (satu) orang eselon II-B Kepala Dinas,1 (satu) orang eselon III-A Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang eselon III-B Kepala Bidang, 2 (dua) orang eselon IV-A Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dan 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional, 9 (sembilan) orang pelaksana, 3 (tiga) orang PPPK Penuh Waktu, 15 (lima belas) orang PPPK Paruh Waktu dan 1 (satu) orang honorer. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur dengan komposisi sebagai berikut: Lulusan S2 : 18.42%, Lulusan S1 : 52.63%, Lulusan DIII : 2.63%, lulusan SLTA : 26.32%. Namun demikian, upaya meningkatkan kapasitas pegawai akan tetap terus dikembangkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Dilihat dari segi kuantitatif, Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak masih sangat kurang dan memerlukan tambahan pegawai ASN sebanyak 63 orang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat dilihat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Kegiatan (DPPA) Tahun 2025, pada APBD Perubahan melaksanakan 4 (empat) program terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

3.1.6. Capaian Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak pada Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) program dengan hasil capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan target 100%, realisasi terpenuhi 99,00% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 98,80%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
 - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator kinerja tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 92,03%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
 - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
 - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja pengadaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
2. Program peningkatan kerja sama desa dengan target 100%, realisasi terpenuhi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dengan indikator kinerja jumlah kampung yang melakukan kerja sama antar kampung dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100%, capaian k

kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target 100%, realisasi terpenuhi 93,83% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan indikator kinerja cakupan pemerintah desa yang tertib administrasi dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan target 100%, realisasi terpenuhi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**

3.2.REALISASI ANGGARAN

3.2.1Ikhtisar Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025.

3.2.1 Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1			2	3	4	5
5			BELANJA DAERAH	10.177.897.394,00	9,149,077,649,00	89,89
5	1		BELANJA OPERASI	9.706.117.394,00	8.667.297.649,00	89,40
5	1	01	Belanja Pegawai	2.533.776.793,00	2.254.094.458,00	88,96
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.172.340.655,00	6.423.203.191,00	89,56
5	2		BELANJA MODAL	471.780.000,00	471.780.000,00	100,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	471.780.000,00	471.780.000,00	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2025

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp 10.177.897.394,00** terbagi menjadi 4 (empat) program, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang dibagi menjadi 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

2. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 9.149.077.649,00** atau **89,89 %** dari pagu anggaran. Keseluruhan realisasi per sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai berikut (data terlampir berupa Laporan Kinerja), sedangkan capaian realisasi belanja pelaksanaan kegiatan di bawah 75% dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- a.1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp 68.702.600 atau 42,14% dari Rp 163.045.000, dikarenakan adanya tunda bayar PPTK dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi sebesar Rp 50.724.539 atau 42,14% dari Rp 108.800.000, dikarenakan belanja dibayarkan real sesuai dengan yang diterima.
- a.3. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp 14.016.549 atau 44,83% dari Rp 23.750.000, dikarenakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil BM 1438 S tidak ditemukan/hilang dan pembayaran sesuai real.
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- b.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp. 61.680.000 atau 35,59% dari Rp 173.292.800, dikarenakan efesiensi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 sasaran, disimpulkan keseluruhan sasaran tercapai dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. dari 2 sasaran yang sudah ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 2 indikator, bahwa sasaran 1 dengan target persentase kampung mandiri 49,18% terealisasi 97,54% sehingga capaian kinerjanya 198,33% termasuk dalam kategori capaian **“Sangat Tinggi”** dan sasaran 2 dengan target 95,56% terealisasi 100,00% sehingga capain kinerja 104,65% termasuk dalam kategori capaian **“Sangat Tinggi”**

Hasil pencapaian kinerja terhadap 2 sasaran strategis sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2025 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di masa yang akan datang.

Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

- a) Mewujudkan perencanaan program dan kegiatan secara matang sesuai dengan sumber daya yang ada.
- b) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program.
- c) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
- d) Melakukan pendampingan lebih intensif kepada pemerintah kamung agar dapat memenuhi indikator yang sudah ditetapkan melalui Indeks Desa (ID).
- e) Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan kemasyarakatan agar dapat memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat aktif dalam setiap program dan kegiatan di pemerintah kampung.
- f) Melakukan evaluasi terhadap keaktifan program dan kegiatan kelembagaan kampung dan kelurahan.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak di masa yang akan datang.

Siak Sri Indrapura, Februari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK**



drh. Hj SUSILAWATI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710902 199703 200 4